

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank syariah atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (riba) maka bank syaria'ah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjam modal ataupun menginvestasikan dana.

Akan tetapi untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha

Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syari'ah islam, alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya BMT dikalangan masyarakat.<sup>1</sup>

BMT singkatan dari *Baitul Maal wat-Tamwil*. BMT merupakan lembaga keuangan yang berpola syariah dengan sistem “bagi hasil” baik pada kegiatan simpanan/ tabungan harian/ simpanan berjangka, kegiatan pemberian modal/ kredit pembiayaan.<sup>2</sup>

BMT memiliki misi pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha perniagaan sesuai syari'ah, hal ini berlaku untuk seluruh segmen/ lapisan masyarakat yang membutuhkan dana dengan layanan kecepatan dan ketepatan proses pelayanan. Sebagai lembaga ekonomi yang bermisi memperdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil menengah yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan sendi-sendi keislaman.<sup>3</sup> Sebagai salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana dan saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonomi, 2005, hlm.96

<sup>2</sup> Amin Aziz, *Pedoman Pengelolaan BMT*, Jakarta: PINBUK, 2004 hlm 4

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 5

prinsip-prinsip syari'ah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen BMT yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan langsung dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan menjadi kegiatan utama lembaga ini, oleh karena itu memerlukan analisis yang cermat agar bias menghasilkan keuntungan dan mendukung kelangsungan usaha lembaga tersebut.

Sebagian besar dana operasi BMT diputar dalam pembiayaan, keberhasilan dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Sebaliknya apabila BMT terjatuh dalam masalah pembiayaan maka BMT akan menghadapi masalah besar, seperti resiko tak tertagihnya hutang atau pembiayaan macet. Bank-bank di Indonesia terbukti pernah dan sering terjadi kredit macet atau tidak terbayarnya tagihan sebagian bahkan seluruhnya, salah sebabnya yaitu analisis pembiayaan yang tidak cermat. Produk pembiayaan bagi hasil yang dimiliki oleh BMT dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya terkemas dalam sistem jual beli yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 49

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 231

Dalam proses penyaluran dana diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan lembaga yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan adanya rentang waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin akan ditanggung oleh pihak BMT terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur.

Karena dilihat akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang macet. Hal ini dikarenakan kurang adanya ketelitian dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah sebelum proses pembiayaan terlaksana. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kemacetan dalam pembiayaan, antara lain karena kekurangan telitianya didalam menganalisis usaha nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak debitur, kurang mampu manajemen usahanya dan nasabah yang tidak mempunyai I'tikad baik untuk membayar atau mengembalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

KJKS BMT Walisongo merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang berdiri pada 9 September 2005 dan beroperasi di Mijen Semarang ini

---

<sup>6</sup> Adiwarman, karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.255

<sup>7</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 74

memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar dengan memberikan pembiayaan pada nasabahnya untuk lebih menumbuh kembangkan usahanya dengan suntikan modal. Akan tetapi dalam proses penyaluran modal ini diperlukan sebuah manajemen yang baik dalam hal penyaluran pembiayaannya hal ini untuk menghindari terjadinya berbagai resiko yang menyebabkan permasalahan pembiayaan.

Berbagai kebijakan Prosedur dan ketentuan yang berlaku di BMT harus menyesuaikan keadaan nasabah dan dimodifikasi agar tidak memberatkan nasabah dalam pengajuan hingga penyelesaian pembiayaan. Hal ini untuk memberikan kenyamanan nasabahnya dalam bermitra. Akan tetapi tidak meninggalkan standar operasional KJKS dan UJKS yang telah ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri kedudukan permodalan dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No 91/Kep/M KUKM/X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari'ah perlu ditumbuh kembangkan.

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil Dan Menengah, *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi*, 2007

Standar Operasional KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi dalam mengelola kelembagaan usaha dan keuangannya.<sup>9</sup>

Melihat keadaan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kebijakan yang diberlakukan dalam manajemen pembiayaan di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang dalam perspektif aturan koperasi syariah.

Penelitian ini membahas tentang proses manajemen pembiayaan yang berlangsung yaitu mulai dari proses perencanaan, prosedur, analisis kelayakan serta pengawasan dan serta penyelesaian pembiayaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan manajemen pembiayaan di KJKS BMT Walisongo?
2. Bagaimana kesesuaian kebijakan manajemen pembiayaan di KJKS BMT Walisongo dalam perspektif PERMENEG Koperasi dan UKM Nomor 35.2 Tahun 2007 Tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi ?

---

<sup>9</sup>*Ibid*

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti ini, adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan manajemen pembiayaan yang diterapkan di BMT Walisongo Semarang dalam perspektif aturan koperasi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan manajemen pembiayaan di KJKS BMT Walisongo dalam perspektif aturan koperasi.

Adapun manfaat hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang praktek kebijakan manajemen pembiayaan sebagai bahan perbandingan dan menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah.

2. Bagi Akademik

Sebagai alat ukur keberhasilan perkuliahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan informasi dan dapat dijadikan barometer. Apakah kebijakan manajemen

pembiayaan suatu perbankan sudah sesuai dengan standar ketentuan perkoperasian.

#### 4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan dasar pertimbangan dari penelitian selanjutnya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang penulis lakukan, maka akan penulis kemukakan beberapa pendapat, teori atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Kajian-kajian tentang permasalahan tersebut diantaranya :

Azizatul Islamiyah (2010), Dalam skripsinya yang berjudul Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan analisis yang diperoleh bahwa manajemen kredit yang diterapkan PT. BPR Gunung Ringgit sudah mampu dan efektif untuk mengelola kredit dan menurunkan kredit bermasalah dengan menggunakan analisis 5C dan rekomendasi selain itu, dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Faktor penyebab kredit bermasalah adalah nasabah yang tidak memiliki I'tikad yang baik, PT.BPR Gunung Ringgit melakukan langkah-langkah untuk menurunkan kredit bermasalah dengan cara melakukan peringatan tertulis pada nasabah 1-3x, mendatangi debitur bersama tim-tim, debitur akan dibawa ke hukum cukup efektif. Dan dilihat dari kolektibilitas tahun 2007-2009 kredit bermasalah tiap

tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 15,8%, tahun 2008 menurun sebesar 15,2%, sampai tahun 2009 menurun 12,6%<sup>10</sup>.

Enggar Adi Sudjarwo (2010), dalam skripsinya *Analisa Prosedur Dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulung Agung Berdasarkan Undang-Undang Perbankan*. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan Prosedur dan kebijakan aplikasi kredit terutama di Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip Prudential Banking. bahkan meskipun ada kesenjangan dapat menyebabkan kredit macet yang muncul, yaitu kelengkapan dokumen pengajuan kredit yang diperlukan berkaitan dengan keuangan Pernyataan karena bagian dari pelanggan cenderung tidak memiliki laporan keuangan. di samping Analisis permohonan kredit BRI lebih ditekankan pada nilai jaminan bahwa dijamin dibandingkan dengan analisis prospek usaha nasabah dan tabungan kredit Fasilitas hanya menekankan pada kemauan pelanggan untuk menetapnya kredit serta lebih keakraban.<sup>11</sup>

Ade Irma Sari Daulay (2010) dalam skripsinya *Analisis Manajemen Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Kisaran*, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Kisaran menjalankan kegiatan

---

<sup>10</sup> Azizatul Islamiyah, *Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

<sup>11</sup> Enggar Adi Sudjarwo, *Analisa Prosedur Dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulung Agung Berdasarkan Undang-Undang Perbankan*, STIE PERBANAS, Surabaya, 2010

pembiayaan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan yang telah disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) serta dari tahun 2006 hingga tahun 2008 manajemen Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Kisaran tidak berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan perolehan NPF melebihi ketentuan bank Indonesia yaitu lebih besar dari 5%.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Syari'ah Walisongo Mijen Semarang.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ade Irma Sari Daulay, *Analisis Manajemen Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Kisaran*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 6.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) Data Primer

Merupakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis yang dihadapi. Data ini diperoleh langsung dari keterangan pihak manajemen terkait masalah pembiayaan dan untuk memperoleh gambaran umum tentang KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.

#### b) Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia.<sup>14</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a) Wawancara

Yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang

---

<sup>14</sup> Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm.

atau lebih dan berhadapan secara fisik.<sup>15</sup> dengan kata lain penulis mengajukan pertanyaan kepada praktisi seputar masalah kebijakan manajemen pembiayaan.

b) Dokumentasi

Yaitu metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

---

<sup>15</sup> Iman Gunawan , *Metode Penelitian kualitatif Teori &Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, hlm. 143

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 145.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penulisan skripsi ini diatur sebagai berikut:

BAB I (pendahuluan), bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

BAB II (pembahasan umum tentang topik), bab ini berisi tentang pembahasan umum mengenai analisis kebijakan, manajemen pembiayaan, dan perspektif aturan koperasi yang diterapkan oleh KJKS BMT Walisongo.

BAB III (gambaran umum BMT), dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup BMT, sejarah singkat BMT, visi, misi dan motto BMT, struktur organisasi dan produk BMT serta perkembangan BMT.

BAB IV (hasil penelitian): berisi hasil penelitian di BMT mengenai kebijakan pembiayaan, manajemen pembiayaan dan perspektif aturan koperasi mengenai pembiayaan yang diterapkan oleh KJKS BMT Walisongo.

BAB V (pentup): bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.